

KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Dedy Ardiansyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This study aims to determine the performance and Sanitation Department Sidoarjo district in waste management and the factors that influence it. The reason this research background is the garbage problem in Sidoarjo every year the volume of waste continues to increase. But the increase in waste volume is precisely obtained Adipura Sidoarjo regency. This study used qualitative research methods. The type of research is descriptive research. Mechanical election informants using purposive sampling techniques were then developed with the snowball technique. The collection of data obtained by structured interviews, observation, and study documents, Then the data analysis techniques using data reduction, data presentation and test the validity of the data is done by using triangulation of data. The findings of the data in the field show that the performance and Sanitation Department Sidoarjo district in waste management so far has been excellent in dealing with garbage. It can be seen from the response and alertness of employees in solving problems in society, responsiveness of employees, as well as the achievement of the results obtained have been good.

Keywords: Public Organization, Public Organization Performance, Waste Management.

Pendahuluan

Pulau Jawa selain merupakan pusat sektor ekonomi terbesar dengan sebagian besar sektor industri tetapi hal tersebut sangat kontras dengan pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal yang juga berpengaruh kepada lingkungan dan tempat tinggal di wilayah tersebut. Kemudian wilayah perkotaan dan beberapa kota besar lainnya di Pulau Jawa, tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat besar terutama masalah sampah, pencemaran air permukaan, dan sanitasi lingkungan. Dengan kata lain sampah telah menjadi polusi serta kendala utama pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang terjadi setiap harinya yang ada karena ulah manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan serta hidup sehat.

Tabel I.1
Jumlah Timbulan Sampah dari Beberapa Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012

No.	Provinsi	Luas (Km ²)	Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
1.	Provinsi Jawa Tengah	32.544,12	32.382.657	312.593,68
2.	Provinsi Jawa Timur	46.429,00	37.687.622	81.113,40
3.	Provinsi Jawa Barat	37.116,54	43.021.826	49.058,39
4.	Provinsi Banten	9.662,92	10.632.166	28.130,07
5.	Provinsi D.I.Yogyakarta	3.185,80	3.247.491	8.220,00
6.	Provinsi DKI Jakarta	662,33	9.761.622	2.487,61
Pulau Jawa				481.603,15

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup

Jawa Timur merupakan wilayah yang luas dan besar, kawasan yang memiliki banyak wilayah kota dan kabupaten. Karena itu tidak dapat

dipungkiri lagi kawasan di Jawa Timur juga berpotensi menjadi penyumbang sampah terbanyak.

Tabel I.2
Data Volume Sampah di Berbagai Kota dan Kabupaten di Provisi Jawa Timur Tahun 2015

No.	Nama Kota / Kabupaten	Volume Sampah (m ³ /hari)	Lokasi
1	Kota Surabaya	8.700,00	TPA Benowo
2	Kabupaten Sidoarjo	4.517,00	TPA Kupang
3	Kabupaten Jember	3.287,51	TPA Pakusari
4	Kabupaten Gresik	750,00	
5	Kabupaten Jombang	705,97	TPA Gedangkeret
6	Kota Malang	659,21	
7	Kota Batu	655,94	
8	Kota Probolinggo	574,56	
9	Kota Madiun	460,60	
10	Kota Mojokerto	377,00	
11	Kabupaten Tulungagung	341,57	
12	Kabupaten Tuban	291,92	TPAGunung Panggung
13	Kota Blitar	273,00	
14	Kabupaten Bangkalan	214,03	TPA Socah
15	Kabupaten Nganjuk	201,00	
16	Kabupaten Mojokerto	196,00	TPA Multifungsi
17	Kabupaten Bojonegoro	190,00	TPA Banjarsari
18	Kabupaten Bondowoso	175,60	
19	Kabupaten Lumajang	151,84	TPA Besuk
20	Kabupaten Malang	140,00	TPA Talangaagung
21	Kabupaten Madiun	119,36	
22	Kabupaten Pamekasan	96,63	TPA Batuan
23	Kota Pasuruan	61,60	
24	Kabupaten Probolinggo	41,59	TPA Leces
25	Kabupaten Trenggalek	18,29	

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki volume sampah tertinggi di Jawa Timur. Namun meskipun volume sampah di Kota Surabaya tertinggi, pengelolaan sampah di Surabaya telah 80% dikelola dengan baik yang didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai. Setelah Kota

Surabaya, daerah yang memiliki volume sampah tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah volume sampah di Sidoarjo sendiri mencapai 4.517 m³ sampah setiap harinya. Tetapi hanya 20% sampah saja yang mampu dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Belum mampunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengelola sampah dengan baik, tentunya menimbulkan beberapa permasalahan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal tersebut tentunya memerlukan peran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola sampah.

Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah menjadi kawasan industri. Dengan banyaknya kawasan industri di Sidoarjo berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat diketahui dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 9,60%. Berikut tabel peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013 sampai 2015.

Tabel I.3

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2013 s/d 2015

No.	Kabupaten	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
1.	Kabupaten Sidoarjo	2.048.986	2.083.924	2.117.279

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dapat diketahui peningkatan tersebut mencapai 9,60% sehingga peningkatan jumlah sampah per hari semakin bertambah banyak, karena angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tinggi juga dapat mempengaruhi peningkatan volume sampah yang terus meningkat sehingga menjadikan suatu permasalahan dalam penanganan sampah.

Tabel I.4

Perbandingan Jumlah Sampah yang Terangkut oleh DKP Sidoarjo dengan Produksi Sampah dari Tahun 2010 s/d 2014

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah sampah yang terangkut	M3/hari	802	810	820	802	924
Jumlah produksi sampah	M3/hari	4.043	4.421	4.517	4.517	4.517
Persentase jumlah sampah yang terangkut	%	19,84	18,32	18,15	17,76	20,46

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo

Dari data tabel di atas realisasi jumlah sampah yang terangkut ke TPA tahun 2014 sebanyak 924 m³/hari. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 dan 2012 terjadi peningkatan jumlah sampah yang terangkut sebanyak 122 m³/hari atau 15,21%. Realisasi ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah/armada angkutan sampah dan sarana prasarana dapat menambah jumlah sampah yang tertangani. Akan tetapi kinerja dari dinas masih kurang maksimum karena banyaknya sampah yang banyak belum tertangani. Oleh karena itu diperlukan adanya keseriusan dan regulasi dalam menangani sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah.?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo serta kesadaran masyarakat dalam menangani dan pengelolaan sampah.?

Dan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dan Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan sampah.

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam kerangka penelitian dan juga pengembangan lebih lanjut dalam penerapan ilmu khususnya dibidang organisasi sektor publik. Dengan mengambil rujukan studi terdahulu milik Retno Yunita Siswandi dengan judul Kinerja Organisasi (Studi Deskriptif Tentang Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dalam Pengelolaan Sampah). Simpulan dari penelitian tersebut kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan selama ini sudah cukup baik dalam pengelolaan sampah tetapi belum optimal hal ini dapat dilihat dari pendistribusian sumber daya yang kurang efektif dan kualitas kerja yang kurang baik namun dan belum optimal sehingga dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.

Landasan Teori

Pengertian Organisasi Publik

Pada dasarnya organisasi juga merupakan suatu entitas sosial yang saling terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Adapun pengertian dari para ahli mengenai organisasi (dalam Kusdi, 2009:4)

- a. Mills dan Mills (2000) mendefinisikan organisasi sebagai : *“specific collectivities of people whose activities are coordinated and controlled in and for the achievement of defined goals”*. Organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Sementara itu, C. Argyris, salah seorang tokoh utama yang mengawali pandangan tentang pentingnya pembelajaran (*learning*) dalam organisasi, mendefinisikan organisasi sebagai berikut (dalam Dunsire, 1973): *“Organizations are grand strategies individuals create to achieve objectives that require the effort of many.”* Organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang.
- c. Hatch (1997) menjelaskan bahwa organisasi memang dapat didefinisikan dengan berbagai cara, melihatnya sebagai struktur sosial, teknologi, kultur, struktur fisik, atau bagian (sub-sistem) dari lingkungan.
- d. E. Wight Bekke (lihat dalam Dunsire, 1973) mendefinisikan organisasi sebagai berikut, Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang menggunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, odal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecah masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dengan lingkungan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan Organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem yang penting dan dimana diantara subsistem itu saling berinteraksi

dalam upaya untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan dari organisasi..

Kinerja Organisasi Publik

Dalam organisasi pengukuran sebuah kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dari sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Indriyo Gitokusumo, (Komang Ardana. Dkk,2008:1). Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

Sementara itu Bernadin dan Russel (1999) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan Bernadin dan Russel, Amstrong (1994) juga mengemukakan mengenai kinerja melihat dari esensi kinerja merupakan suatu proses bersama antara manajer, individu dan tim yang dikelola, dimana proses ini lebih didasarkan pada prinsip pengetahuan, keterampilan, kompetisi dan serta rencana kerja dan juga penempatannya. (dalam Azhari Aziz, 2008:17)

Beberapa elemen kinerja yang dikemukakan oleh Harbani Pasolong (Pasolong, Harbani. 2007: 177) diantaranya :

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak lanjut, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Adapun pengertian dari para ahli kinerja organisasi antara lain (dalam Edy Sutrisno, 2010:170) :

1. Lawler dan Porter (1997), yang menyatakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas.

2. Prawirosentono (1999), mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
3. Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan.
4. Menurut Gilbert (1978), berpendapat sebaliknya, bahwa kinerja pada dasarnya adalah produk waktu dan peluang. Peluang tanpa waktu untuk mengejar peluang tersebut bukan apa-apa. Dan waktu, yang kita tidak miliki, yang tidak memberi peluang, bahkan memiliki sedikit nilai. Perbaikan kinerja untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi.
5. Menurut Bambang Kusriyanto (Anwar Prabumangkunegara, 2005:9). Definisi kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (per jam).
6. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000) bahwa “kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
7. Menurut (Eztoni 1964; Pfeffer 1982; model “*rational goal*” atau “*purposive-rational*”, organisasi didesain untuk mencapai tujuan tertentu, yang berfokus pada tingkatan pada kriteria kinerja organisasi serta bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya.

Jadi dapat dikatakan dari definisi di atas bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi, dan kinerja juga merupakan hasil sebuah kerja seseorang atau karyawan yang dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah yang mulai dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan sampai pengolahan dan pembuangan akhir (Cipta Karya, 1993). Pengelolaan sampah terdiri dari 2 jenis yaitu pengelolaan setempat (individu) dan pengelolaan terpusat untuk lingkungan atau perkotaan. Menurut Kodoatie (2003), Sistem pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat, dan teratur. Adapun beberapa aspek komponen dalam pengelolaan sampah yaitu antara lain:

1. Aspek teknik operasional (teknik)
2. Aspek kelembagaan (institusi).
3. Aspek pembiayaan (finansial);
4. Aspek hukum dan pengaturan (hukum).
5. Aspek peran serta masyarakat.

Karena sistem pengelolaan limbah padat perkotaan harus utuh dan tidak terpotong rantai ekosistemnya maka diperlukan tindakan terkoordinatif antara satu dengan yang lain, sinkronisasi dan simplikasi. Untuk peningkatan penanganan persampahan banyak hal yang harus ditinjau diantaranya yaitu operasional pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir serta peralatan yang digunakan. Disamping itu yang sangat berperan adalah aspek organisasi dan manajemen didalam pengelolaannya (dalam Departemen Pekerjaan Umum, 1990:15).

a. Pewadahan Sampah

Merupakan salah satu cara untuk menampung sampah sementara melalui dari masing-masing sumbernya. tujuan dari pewadahan tersebut untuk menanggulangi apabila sampah tercecer kemana-mana oleh sebab itu dibutuhkan adanya pewadahan agar tidak berserakan. Pada dasarnya pewadahan sampah dibedakan menjadi beberapa karakteristik sampah baik dari sampah kering, basah, plastik, dan organik. Kegunaan dari pemilahan berdasarkan pewadahan bertujuan untuk dapat memisahkan antara yang mudah didaur ulang dan untuk diolah kembali menjadi bahan kerajinan. Untuk mencegah sampah berserakan yang akan memberikan kesan kotor serta mempermudah proses kegiatan pengumpulan maka dari sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk penyimpanan atau penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah. Namun pendekatan untuk perwadahan sampah harus mendukung dan sesuai dengan persyaratan sistem pengelolaan sampah di sumbernya, dan sesuai dengan persyaratan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah kota yang direncanakan.

Dalam rangka mendukung program pemilahan disumbernya, lembaga pengelola sampah kota perlu memberikan arahan menggunakan sistem wadah yang memisahkan

antara sampah basah dengan sampah kering yang banyak mengandung material yang dapat di daur ulang. Yang paling penting dalam membina pewadahan adalah mendorong masyarakat untuk tertib membuang sampah pada tempatnya serta tertib memilah sampah. (Cipta Karya, 1993).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pewadahan atau penampungan sampah (*Tchobanoglous, 1993*) adalah:

1. Jenis sarana pewadahan yang digunakan.
2. Lokasi penempatan sarana pewadahan.
3. Kesehatan dan keindahan lingkungan.
4. Metode pengumpulan yang digunakan.

Menurut SK SNI T-13-1990-F, persyaratan bahan untuk pewadahan sampah adalah sebagai berikut:

1. Tidak mudah rusak dan kedap air kecuali kantong plastik atau kertas.
2. Mudah untuk diperbaiki.
3. Ekonomis, mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat.
4. Mudah dan cepat dikosongkan.

Sedangkan penentuan ukuran volume ditentukan berdasarkan :

1. Jumlah penghuni tiap rumah.
2. Tingkat hidup masyarakat.
3. Frekuensi pengambilan/pengumpulan sampah.
4. Cara pengambilan sampah.
5. Sistem pelayanan (individual atau komunal).

Jadi untuk melakukan proses pewadahan sampah diperlukan adanya arahan serta dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan melakukan membuang sampah secara tepat di wadah yang telah disediakan yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat dalam hal menjaga lingkungan.

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan merupakan sebuah proses penanganan sampah dengan cara mengumpulkan dari berbagai masing-masing sumber sampah. Untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau pembuangan akhir sampah tanpa melalui proses pemindahan.

Adapun beberapa cara pengumpulan sampah sebagai berikut:

a. Pola Individual Langsung

Merupakan cara pengumpulan sampah dari rumah-rumah/sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Pola individual langsung dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 5%) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi.

2. Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.

3. Kondisi dan alat memadai.

4. Jumlah timbulan sampah > 0,3 m³/hari

b. Pola Individual Tak Langsung

Merupakan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya rendah.
2. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.
3. Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung.
4. Kondisi topografi relatif datar (rata-rata > 5%).
5. Kondisi lebar jalan dapat dilalui alat pengumpul.
6. Organisasi pengelola harus siap dengan sistem pengendalian.

c. Pola Komunal Langsung

Merupakan cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Bila alat angkut terbatas
2. Bila kemampuan pengendali personil dan peralatan relatif rendah.
3. Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah.
4. Peran serta masyarakat tinggi.
5. Wadah komunal mudah dijangkau alat pengangkut.
6. Untuk pemukiman tidak teratur.

d. Pola Komunal Tidak Langsung

Merupakan cara pengumpulan sampah masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat tinggi.
2. Penempatan wadah komunal mudah dicapai oleh pengumpul.
3. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.
4. Kondisi topografi relatif datar (> 5%).
5. Lebar jalan/gang dapat dilalui oleh pengumpul.
6. Organisasi pengelola harus ada.

Tata cara operasional pengumpulan sampah harus memperhatikan sebagai berikut ini:

1. Ritasi 1-4 rit/hari
2. Periodeisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari tergantung kondisi komposisi sampah. (semakin besar prosentase sampah organik maka periodeisasi pelayanan maksimal sehari), kapasitas kerja, desain peralatan, dan kualitas pelayanan.
3. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap.
4. Mempunyai petugas pelaksana yang tetap.
5. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh, dan kondisi daerah.

Jadi dengan cara pengumpulan sampah diharapkan sampah dapat dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses serta memerlukan waktu yang cukup lama, serta sampah tidak lagi menumpuk karena pengumpulan sampah yang tidak sesuai jadwal yang diberikan.

c. Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah adalah merupakan sebuah tahap untuk memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Operasi pemindahan dan pengangkutan menjadi diperlukan apabila jarak angkut ke pusat pemrosesan/TPA sangat jauh sehingga pengangkutan langsung dari sumber ke TPA dinilai tidak ekonomis. Hal tersebut juga menjadi penting bila tempat pemrosesan berada di tempat yang jauh dan tidak tepat dijangkau langsung.

Tempat penampungan/pembuangan sementara (TPS) merupakan istilah yang lebih populer bagi sarana pemindahan dibandingkan dengan istilah transfer depo. Persyaratan TPS/transfer Depo yang ramah lingkungan adalah:

- a. Bentuk fisiknya tertutup dan terawat.
- b. TPS dapat berupa pool gerobak atau pool container.
- c. Sampah tidak berserakan dan bertumpuk diluar TPS/kontainer.

Untuk menjamin terkontrolnya kebersihan dengan lingkungan di sekitar TPS, hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah:

- a. Peran masyarakat tinggi.
- b. TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah bagi sarana pengumpul dan pengangkutan untuk masuk dan keluar, tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya.

- c. Pengangkutan sampah terhadwal, sehingga waktu kedatangan gerobak dengan waktu kedatangan truk dapat disesuaikan.
- d. Periodeisasi pengangkutan 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali.
- e. Semua sampah terangkut pada proses pengangkutan.

Jadi untuk melakukan pemindahan sampah dari depo ke TPA diperlukan adanya ketepatan waktu antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesemrawutan waktu pengiriman dengan waktu pembuangan sampah dan diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam proses pemindahan sampah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif yakni menggambarkan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah. Lokasi penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive Sampling* dan berkembang menjadi *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi studi kepustakaan dan data online. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi penarikan dan kesimpulan serta teknik keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan temuan data, selama ini kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dalam kinerjanya dalam pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo bekerja sendiri dalam melakukan pengelolaan sampah dan berusaha menjadi lebih baik meskipun ada keterbatasan dalam pengelolaannya. Terlihat dengan adanya jumlah sampah yang tidak terangkut semakin berkurang. Namun, disisi lain tidak sepenuhnya sampah dapat terangkut seluruhnya dan masih ada sampah yang tersisa dalam TPS.

Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah secara umum masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasannya baik dari kurangnya fasilitas dan dana, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Untuk menilai Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah ini menggunakan kinerja organisasi. Untuk menilai kinerja organisasi suatu instansi, khususnya Dinas Kebersihan dan

Pertamanan dapat dilakukan dengan berbagai aspek. Dalam hal kaitannya apabila ingin menilai kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi publik maka diperlukan aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur kinerja organisasi tersebut antara lain :

1. Responsibilitas
2. Daya tanggap
3. Efektivitas

Dari semua aspek yang telah disebutkan sebelumnya, akan dibahas secara rinci terkait pencapaian keberhasilan yang telah dilakukn oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pad uraian berikut ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pad uraian berikut ini.

Responsibilitas

Menurut Agus Dwiyanto (1995), responsibilitas merupakan kemampuan yang menunjukkan adanya tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dalam organisasi publik. Cakupan penilaian kinerja organisasi tidak terlepas dari bentuk respon dan kesigapan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pertanggungjawaban serta menanggapi keluhan masyarakat yang ada di lapangan.

Kualitas kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dari cara dinas memberikan respon kepada masyarakat serta kesigapan pegawai dalam memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari diberikannya penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat, dengan membuat berbagai macam program-program yang bertujuan untuk upaya kebersihan lingkungan. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo untuk menjadikan terciptanya lingkungan yang kebersihan di Wilayah Sidoarjo. Dengan membangun banyak TPS serta melakukan penyebaran pasukan-pasukan kebersihan serta mendistribusikan dan meningkatkan fasilitas yang ada untuk mengurangi jumlah timbunan sampah kepada masyarakat. Tetapi dengan luasnya wilayah cakupan yang harus dilayani sehingga ada keterbatasan dalam melakukan pelayanan pengelolaan sampah.

Cakupan penilaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan responsibilitas dimaksud untuk mengetahui bagaimana kualitas kinerja dengan kesigapan pegawai serta menanggapi banyaknya keluhan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, jika sudah diketahui demikian. Hendaknya untuk periode mendatang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo harus mampu lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerjanya.

Daya tanggap

Daya Tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan akan

masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Daya tanggap diperlukan oleh suatu organisasi atau instansi yang bergerak dibidang pelayanan jasa, khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan dan mengembangkan program-program yang sesuai pelayanan operasional.

Dalam hal ini, daya tanggap memiliki arti kemampuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah, adanya keluhan, serta pelaksanaan kinerjanya dalam memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah sudah sesuai dengan standart operasional. Daya tanggap dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Sidoarjo, baik dalam pelaksanaan kinerja sudah sesuai, untuk menyikapi permasalahan yang ada di lapangan sudah baik dan juga memberikan perhatian kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Dalam pembentukan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo juga mengajak masyarakat terutama dalam membersihkan sampah di lingkungan mereka, dan dirasa daya tanggap yang diberikan dinas kepada masyarakat sudah sesuai, untuk menyampaikan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian pastinya ada kekurangan dalam setiap memberikan pelayanannya tersebut.

Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan organisasi. Salah satu cakupan penilaian kinerja ini membahas tentang kesesuaian keberhasilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah serta pencapaian hasil dari kegiatan. Dalam efektivitas pastinya ada capaian yang ingin diwujudkan oleh dinas dan sudah tercapai dengan baik.

Dalam hal ini, Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sudah bekerja keras dalam mengurangi jumlah timbunan sampah yang dulu hanya mampu menangani 900 m³ sekarang meningkat menjadi 1200 m³, hasil itu diperoleh atas kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah. Untuk mencapai hasil yang maksimal Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan pengawasan dan pendampingan di TPS yang ada serta mengajak masyarakat untuk membuang pada tempat yang sudah disediakan. Atas capaian hasil yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, selama bertahun-tahun ini mendapatkan prestasi berupa penghargaan Adipura.

Oleh karena itu dapat dikatakan efektivitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sudah dikatakan baik dengan menerima

penghargaan Adipura setiap tahunnya membuat capain hasil yang dilakukan sudah berhasil. Sehingga untuk tahun kedepannya dapat dipertahankan atas hasil kerjanya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah

Meningkatnya Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah serta belum sepenuhnya optimal dari kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik itu faktor yang menghambat ataupun yang mendukung. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya, struktur organisasi, dan partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang cukup sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Organisasi apapun dalam melaksanakan tugasnya meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya dalam jumlah yang mencukupi, maka akan sulit untuk menghasilkan kinerja yang baik. Demikian juga dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun diperlukan berbagai sumber daya yang meliputi uang atau dana, staff atau pegawai, fisik atau fasilitas.

Sumber daya yang pertama yaitu keuangan/dana. Dana merupakan sumber daya yang amat vital yang mempunyai peranan besar di dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Semua kegiatan organisasi memerlukan dana. Kecukupan akan sumber daya keuangan/dana akan mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dilakukan secara maksimal atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan-kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah meliputi kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, kegiatan pengembanaan program dan teknologi dalam pengelolaan persampahan. Untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Namun, dalam kenyataannya, dana yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan untuk mendukung kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya dana yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. Secara

keseluruhan, anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta perbaikan sarana dan prasarana mengalami kenaikan pada tahun 2013 di banding pada anggaran pada tahun 2012. Namun untuk anggaran kegiatan peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana semakin meningkat. Hal ini terjadi pembengkakan anggaran pengeluaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan sehingga dapat menghambat kerjanya dalam pengelolaan sampah.

Sumber daya yang kedua adalah sumber daya staff/pegawai. Sumber daya staff/pegawai merupakan aset yang penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu organisasi. Untuk dapat mencapai kinerja yang baik, maka suatu organisasi. Untuk dapat mencapi kinerja yang baik, maka suatu organisasi memerlukan sumber daya staff/pegawai yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah staff/pegawai yang dimiliki kurang cukup. Dengan luasnya cakupan wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak dapat menjangkau tempat yang jauh yang berada di wilayah Sidoarjo dalam pengelolaan sampah, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor penghambat kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dari segi kualitas, sumber daya staff yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah sudah cukup memadai. Para staff telah memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing tetapi untuk staff kebersihan masih kurang untuk meningkatkan kualitas kinerja membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk pengoptimalan dalam pengelolaan sampah.

Sumber daya yang terakhir adalah sumber daya fisik/fasilitas. Sumber daya fasilitas adalah fasilitas fisik atau input berupa peralatan serta fasilitas pendukung kinerja organisasi. Sumber daya fasilitas akan dilihat dari kecukupannya. Secara teori, jika fasilitas yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo belum cukup memadai.

Sumber daya fisik/fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah belum mencukupi dan belum optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya fasilitas kendaraan yang tidak layak beroperasi serta beberapa armada truk yang masih dalam peremajaan unit. Inilah yang dapat menghambat kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiao bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai

tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Struktur organisasi mempunyai tiga komponen dasar yaitu, formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat-tingkat diferensiasi yang ada didalam organisasi, jumlah tingkatan didalam pengorganisasian. Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo begitu formalis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan dan prosedur yang mengatur setiap orang mengenai apa yang harus dikerjakannya. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki aturan yang jelas. Setiap staff telah memiliki rincian tugas yang lebih spesifik dan bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing.

Selanjutnya adalah sentralisasi. Sentralisasi menunjukkan tersebarinya wewenang diantara pekerjaan didalam organisasi, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi yang sentralistis. Hal ini ditunjukkan dari kewenangan yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo khususnya dibidang kebersihan sebagai pelaksana hanya mampu melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan oleh kepala dinas.

Komponen terakhir adalah kompleksitas. Kompleksitas menunjukkan adanya pembagian pekerjaan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak terlalu kompleks. Bagian tata usaha menangani kepegawaian, sekretariat, perlengkapan. Kemudian ada juga bidang Kebersihan, bidang Pertamanan dan bidang sarana dan prasarana dan penyuluhan. Masing-masing kepala bidang juga bertanggungjawab kepada kepala dinas. Organisasi dengan berbagai macam dan jenis pekerjaan serta jumlah unit yang banyak dan berbeda-beda akan menimbulkan lebih banyak persoalan keorganisasian. Jenis pekerjaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, khususnya bidang kebersihan tidak terlalu dalam pembagian kerjanya, sehingga hal ini tidak akan menimbulkan lebih banyak persoalan dalam keorganisasian.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) yang diacu dalam Harahap (2001), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan, tentang apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program. Dalam kinerja organisasi sektor publik, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut.:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dirasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi publik yang melayani masyarakat dalam hal kebersihan dan pengelolaan sampah. Jadi, partisipasi masyarakat memang sangat diperlukan. Tanpa adanya itu, maka segala kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik. Dan secara otomatis, akan berpengaruh terhadap kinernyanya. Kesadaran serta partisipasi masyarakat Sidoarjo terhadap sampah dan pengelolaannya sangatlah kurang. Itu terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dari banyaknya yang membuang sampah sembarangan. Dari tingkat kepedulian saja masih sangat rendah, apalagi partisipasi.

Inilah yang menjadi penyebab kendala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah. Masyarakat Sidoarjo masih belum bisa menjaga kebersihan dari cara membuang sampah yang masih disebarkan tempat. Selain itu, diperlukan juga pelaksanaan program 3R untuk lebih ditingkatkan. Masih banyak warga yang belum menerapkan program itu. Jika demikian, maka kurangnya partisipasi masyarakat akan menjadi penghambat bagi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya dalam pengelolaan sampah.

Kesimpulan

Pada bab ini peneliti berusaha memberikan kesimpulan dari data lapangan yang telah diproses pada bab sebelumnya tentang kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah. Secara umum kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dinilai sudah bagus. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mengelola sampah dengan baik dan memanfaatkannya kembali, sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan volume sampah. Dari hasil analisa dan interpretasi data di lapangan dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. Dalam memberikan responsibilitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sudah sigap dalam memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam memberikan sosialisasi serta memberikan pendampingan di setiap TPS di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi untuk melakukan pengambilan seluruh sampah di wilayah Sidoarjo masih belum mampu dilakukan secara maksimal, karena keterbatasan dalam sarana dan prasarannya. Selain itu, di Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki satu TPA yaitu TPA Kupang, untuk pengelolaan sampahnya disana masih menggunakan sistem *open dumping* (setelah dilakukan perataan sampah kemudian di tumpuk dengan sampah yang baru tanpa dilakukan proses pengolahan lainnya).
 - b. Daya Tanggap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo yaitu dalam pembentukan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah melibatkan masyarakat, dimana dalam pengambilan sampah sudah sesuai dengan jam operasional di setiap spot-spot di TPS dengan menambah jumlah pasukan gerobak dan disebar di setiap wilayah yang nantinya akan membantu mempercepat pengambilan sampah dan cepat dalam menangani keluhan dari masyarakat.
 - c. Untuk Efektivitas dari kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo juga sudah mengalami peningkatan. Dalam pencapaian program dari capaian tersebut setiap tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan Adipura untuk kategori kota sedang, ini dibuktikan dengan usaha Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan mendapatkan hasil yang baik. Dan selanjutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan pihak Jawa Pos untuk mengenalkan program Zero Waste kepada masyarakat dan mengajak warga mereka dalam bersih lingkungan dan cara yang baik untuk terbebas dari sampah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah yaitu :
 - a. Faktor sumber daya dana. Sumber daya dana bisa mempengaruhi dan menghambat kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan adanya untuk pengeluaran pembuatan program-program yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo adanya peningkatan jumlah anggaran di tahun 2013 mengalami peningkatan di banding tahun 2012.
 - b. Sumberdaya staf/pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari segi kuantitasnya, jumlah staf yang dimiliki masih dirasa kurang. Karena beban tugas yang diterima, sementara luasnya cakupan wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Sidoarjo. Menjadikan salah satu faktor menghambat kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah. Dari segi kualitas sumber daya yang dimiliki oleh para staf sudah cukup baik dari tingkat pendidikan, pengetahuan, serta dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
 - c. Sumber daya fasilitas. Tersedianya fasilitas akan dapat mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas yang ada masih belum mencukupi untuk penanganan sampah. Hal ini cukup menghambat kinerja Dinas dalam pengelolaan sampah.
 - d. Faktor yang kedua adalah Struktur organisasi. Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sangat formalis dan sudah memiliki pembagian tugas kerja masing-masing yang jelas dan tidak terlalu kompleks. Jenis pekerjaan dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tidak terlalu banyak pembagiannya, sehingga tidak akan menimbulkan lebih banyak persoalan keorganisasian. Dan tentu saja menjadi faktor pendukung. Meskipun demikian struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga bersifat sentralistik, tentu saja bisa menjadi kendala dan berakibat pada memperlambat Dinas dalam menindak lanjuti berbagai masalah yang ada.
 - e. Faktor ketiga adalah partisipasi masyarakat. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo terhadap sampah dan pengelolaannya sangat kurang. Hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat masih sangat minim. Terbukti dari banyaknya masyarakat yang membuang sampah masih sembarangan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam

pengelolaan sampah, maka akan diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai instansi pemerintah dalam memberikan respon kepada masyarakat supaya di tingkatkan lagi dalam menangani keluhan dari masyarakat. Lebih memperluas pengawasan terhadap masyarakat karena pengawasan yang diberikan saat ini masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan pelayanan sampah yang cakupan wilayahnya luas dengan cara bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan sampah.
2. Perlunya peningkatan jumlah sumber daya manusia dengan merekrut untuk penambahan jumlah pasukan penyapu dan penggerobak. Hal ini sangat dibutuhkan untuk capaian kinerja.
3. Sumber daya fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, terutama alat kebersihan, kendaraan truk pengangkut sampah, dan alat-alat untuk keselamatan bagi para pegawai. Perlu juga disediakan fasilitas di setiap TPS di tempatkan conveyor serta alat pemilah sampah.
4. Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo masih sentralistis, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai. Maka dalam hal ini diperlukan kewenangan yang lebih atau desentralisasi kekuasaan agar dapat cepat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan.
5. Lebih digiatkan lagi penyuluhan tentang masalah sampah, bahaya kedepan dari sampah sampai dengan pengelolaan sampah kepada masyarakat agar lebih

mengerti tentang bagaimana cara mengolah sampah dengan baik dan benar dengan demikian masyarakat bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan mereka.

Daftar Pustaka

- Ardana, Komang. dkk .2008. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Azhari Aziz. *Kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Ibu Kota Jakarta Dengan pendekatan Systems Thinking dan Sistem Dynamics*. Disertasi. Universitas Indonesia. 2008
- Departemen Pekerjaan Umum (1990), SK SNI. T-13-1990-F, *Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*, Bandung: Yayasan LPMB
- Kusdi. 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Prabumangkunegara, Anwar A.A. 2005, *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama..
- Sutrisno, Edy. 2010, *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.